KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Provinsi Riau

Nomor Registrasi: 14-226150-2024

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Informasi Pembinaan KUMKM berbasis Website (plut.riau.go.id)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (iga2021-Disperindag.provinsi.riau)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.5. Nama Inisiator

FIFI NOFIANI, SE, MM

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

koperasi, usaha kecil, dan menengah

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

A. Dasar Hukum

Sistem Informasi Pembinaan KUMKM Riau merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mengintegrasikan proses pendataan, pelayanan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, publikasi, pemasaran, serta pengembangan pembelajaran bagi KUMKM binaan UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau dalam satu platform digital. Dasar hukum yang melandasi inovasi ini adalah :

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**, sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sebagai dasar penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
2. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**, sebagai dasar peningkatan kualitas, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, sebagaimana telah beberapa kali diubah, sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk pemberdayaan koperasi dan UMKM.
4. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**, sebagai landasan dalam pengelolaan dan perlindungan data pelaku KUMKM.
5. **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, sebagai dasar pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
6. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**, sebagai dasar penyelenggaraan tata kelola data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

B. Permasalahan

Pembinaan KUMKM merupakan proses yang membutuhkan data yang akurat, pendampingan berkelanjutan, serta koordinasi antara pemerintah, pendamping, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu:Sistem ini dikembangkan bukan hanya sebagai database KUMKM tetapi juga menjadi pusat informasi dan manajemen pembinaan KUMKM terintegrasi.

Pembinaan KUMKM di UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau telah dilaksanakan melalui berbagai layanan, antara lain konsultasi usaha, pelatihan, pendampingan, fasilitasi legalitas, pengembangan produk, pemasaran, kemitraan, akses pembiayaan, inkubasi dan layanan pengembangan usaha lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kondisi yang perlu diperbaiki, antara lain:

1. Data KUMKM masih tersimpan secara manual, sehingga menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan data eksternal dan pelaksanaan pendampingan yang lebih terarah, terukur, tepat sasaran, serta berkelanjutan.
2. Belum seluruh data pelayanan dan riwayat pembinaan terdokumentasi dalam satu sistem.
3. Monitoring terhadap perkembangan KUMKM setelah mendapatkan pelayanan belum optimal.
4. Informasi mengenai kegiatan dan layanan UPT PLUT belum terintegrasi dengan database KUMKM.
5. Promosi produk KUMKM binaan masih dilakukan secara terpisah melalui berbagai media.
6. Belum tersedia market hub yang menghubungkan KUMKM binaan dengan calon konsumen dan mitra.
7. Materi pelatihan dan pembelajaran belum terintegrasi dalam suatu Learning Management System (LMS).
8. Pengambilan keputusan pimpinan masih membutuhkan proses pengumpulan dan pengolahan data secara manual.

C. Isu Strategis

Isu strategis yang melatarbelakangi pembangunan Sistem Informasi Pembinaan KUMKM berbasis website **plut.riau.go.id** adalah:

“Bagaimana mewujudkan pembinaan KUMKM yang terintegrasi, berbasis data, mudah diakses, terukur, dan berkelanjutan melalui transformasi digital pelayanan pembinaan KUMKM.”

Isu tersebut semakin penting karena:

- transformasi digital menuntut pelayanan pemerintah yang cepat dan mudah diakses;
- jumlah dan karakteristik KUMKM sangat beragam sehingga membutuhkan pendekatan pembinaan yang lebih terarah;
- kebijakan pembangunan daerah membutuhkan data KUMKM yang valid sebagai dasar perencanaan program;
- pembinaan KUMKM tidak cukup hanya berupa kegiatan pelatihan, tetapi harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui proses **pendataan → pemetaan kebutuhan → pembinaan → pendampingan → monitoring → evaluasi → tindak lanjut**;
- diperlukan satu sumber informasi yang dapat digunakan bersama oleh pengelola program, pendamping, dan pelaku KUMKM.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya transformasi digital dalam pengelolaan pembinaan KUMKM melalui suatu sistem informasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, dikembangkan SIP-KUMKM RIAU sebagai sistem informasi berbasis web yang secara bertahap mengintegrasikan data, pelayanan, monitoring, promosi, pemasaran dan pembelajaran KUMKM.

D. Metoda Pembaharuan

Inovasi **Sistem Informasi Pembinaan KUMKM berbasis website (plut.riau.go.id)** menggunakan pendekatan transformasi layanan dari proses yang sebelumnya

tersebar/manual menjadi **layanan digital yang terintegrasi dan berbasis data**. Melalui sistem ini, setiap KUMKM binaan akan memiliki profil dan rekam jejak pembinaan secara digital, mulai dari data identitas usaha, jenis usaha, legalitas, produk, kebutuhan usaha, pelayanan yang telah diterima, hasil pendampingan, pelatihan yang diikuti, hingga perkembangan usaha setelah memperoleh pembinaan. Dengan tersedianya riwayat tersebut, petugas dapat memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing KUMKM sehingga pelayanan dan pendampingan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Sistem ini juga diarahkan untuk mendukung penerapan pendekatan pembinaan berbasis kebutuhan (need-based development). Data hasil pendataan dan asesmen KUMKM dapat menjadi dasar dalam menentukan jenis layanan yang sesuai. KUMKM yang membutuhkan penguatan legalitas dapat diarahkan pada layanan legalitas, KUMKM yang membutuhkan peningkatan kapasitas dapat diarahkan pada pelatihan, sedangkan KUMKM yang telah siap berkembang dapat diarahkan pada akses pembiayaan, kemitraan, perluasan pasar, maupun program inkubasi.

E. Keunggulan dan Kebaharuan

Sistem Informasi Pembinaan KUMKM **plut.riau.go.id** memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. **Terintegrasi**, menghubungkan informasi profil KUMKM, pembinaan, pendampingan, kegiatan, dan monitoring dalam satu platform.
2. **Mudah diakses**, karena berbasis website dan dapat digunakan melalui perangkat yang terhubung dengan internet.
3. **Berbasis data**, sehingga perencanaan pembinaan dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata pelaku KUMKM.
4. **Memiliki rekam jejak pembinaan**, sehingga perkembangan setiap pelaku KUMKM dapat dipantau dari waktu ke waktu.
5. **Meningkatkan transparansi layanan**, karena informasi program dan proses pembinaan dapat disajikan secara lebih terbuka.
6. **Meningkatkan efisiensi**, dengan mengurangi penggunaan dokumen fisik dan proses administrasi berulang.
7. **Mendukung pengambilan keputusan**, melalui penyajian data, statistik, dan dashboard pembinaan.
8. **Mendukung koordinasi**, karena informasi dapat menjadi dasar komunikasi antara pengelola, pendamping, dan pelaku KUMKM.

Kebaruan inovasi terletak pada perubahan paradigma pembinaan KUMKM dari **“berbasis kegiatan” menjadi “berbasis data dan siklus pembinaan.”**

Sistem tidak hanya menampilkan informasi mengenai kegiatan KUMKM, tetapi membangun alur layanan: **Data KUMKM → Identifikasi Kebutuhan → Perencanaan Pembinaan → Pelatihan/Konsultasi → Pendampingan → Monitoring → Evaluasi → Tindak Lanjut.** Dengan demikian, setiap intervensi pembinaan dapat dikaitkan dengan profil dan kebutuhan pelaku usaha serta memiliki rekam jejak yang dapat digunakan untuk evaluasi.

Kebaruan lainnya adalah tersedianya **satu pintu informasi pembinaan KUMKM melalui plut.riau.go.id**, sehingga pelaku usaha tidak perlu mencari informasi dari berbagai sumber

yang terpisah.

F. Tahapan Inovasi

Tahap 1 – Identifikasi dan Analisis Kebutuhan

Tahap 2 – Perancangan Sistem

Tahap 3 – Pengembangan Website

Tahap 4 – Uji Coba dan Validasi

Tahap 5 – Implementasi

Tahap 6 – Monitoring dan Evaluasi

Tahap 7 – Pengembangan Berkelanjutan

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi ini dikembangkan bertujuan untuk:

1. Mengubah pengelolaan data KUMKM dari sistem manual menjadi database digital.
2. Menyediakan satu sumber data KUMKM yang terintegrasi.
3. Mendokumentasikan seluruh riwayat pelayanan dan pembinaan KUMKM.
4. Memudahkan petugas dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
5. Menyediakan informasi perkembangan KUMKM secara berkala.
6. Meningkatkan akses KUMKM terhadap layanan UPT PLUT.
7. Menjadi media publikasi kegiatan dan program pembinaan.
8. Menjadi market hub bagi produk KUMKM binaan.
9. Menjadi pusat pembelajaran digital melalui pengembangan LMS.
10. Menyediakan data dan dashboard sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh :

Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan KUMKM Riau memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Database KUMKM Terintegrasi.** Menyediakan data KUMKM yang terpusat, mudah diperbarui, diakses, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan data serta pelaporan.
2. **Peningkatan Kualitas Pelayanan.** Memudahkan petugas dalam mengetahui profil, kebutuhan, dan riwayat pembinaan KUMKM sehingga pelayanan dan pendampingan menjadi lebih tepat sasaran.
3. **Monitoring dan Evaluasi Lebih Efektif.** Memudahkan pemantauan perkembangan KUMKM serta hasil pelayanan dan pendampingan secara berkala.

4. **Efisiensi Administrasi.** Mengurangi pencatatan dan pengolahan data secara manual sehingga mempercepat pelayanan dan penyusunan laporan.
5. **Mendukung Pengambilan Keputusan.** Menyediakan data dan dashboard yang dapat digunakan pimpinan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
6. **Memperluas Akses Pasar.** Melalui Market Hub, KUMKM dapat mempromosikan profil dan produknya kepada konsumen maupun calon mitra.
7. **Meningkatkan Akses Pembelajaran.** Pengembangan LMS ke depan memungkinkan KUMKM memperoleh materi pelatihan dan pembelajaran secara digital dan berkelanjutan.
8. **Memperkuat Ekosistem Pembinaan KUMKM.** Mengintegrasikan data, pelayanan, pembinaan, monitoring, publikasi, pemasaran, dan pembelajaran dalam satu platform digital.

1.13. Hasil Inovasi

Hasil inovasi :

1. Terbangun dan beroperasinya portal resmi plut.riau.go.id yang terhubung dengan sistem domain Pemerintah Provinsi Riau.
2. Database KUMKM Binaan yang Terintegrasi, sebagai pusat data KUMKM yang sebelumnya dikelola secara manual dan tersebar.
3. Profil dan Riwayat Pembinaan KUMKM, yang memuat data usaha, kebutuhan, pelayanan, pelatihan, pendampingan, dan perkembangan KUMKM.
4. Sistem Monitoring Pelayanan dan Pembinaan, untuk memantau proses pelayanan serta perkembangan KUMKM setelah mendapatkan pembinaan.
5. Dashboard Informasi KUMKM, yang menyajikan data dan informasi secara ringkas untuk mendukung monitoring dan pengambilan keputusan pimpinan.
6. Market Hub KUMKM, sebagai etalase digital untuk mempromosikan produk dan membuka peluang akses pasar serta kemitraan.
7. Pusat Publikasi Kegiatan, sebagai media informasi program, kegiatan, layanan, dan keberhasilan pembinaan KUMKM.
8. Learning Management System (LMS) yang direncanakan sebagai pengembangan lanjutan untuk mendukung pembelajaran dan peningkatan kapasitas KUMKM secara digital.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

08-08-2024

1.15. Waktu Implementasi

16-08-2024

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

/storage_bskdn_4/2026/A/provinsi/2026/08/19/provinsi-2026-08-19-iga2021_disperindag_provinsi_riau-8ce1b216.pptx

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

0.517349, 101.445838

1.21. Kematangan

87.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• TIM PENYELENGGARA INOVASI
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	11-30 SDM	• Pembentukan Tim Sistem Informasi Pembinaan UMKM • SK Tim Efektif
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• DPA Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 2026 • DPA Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 2024 • DPA Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Konsultan • Market Hub • Infografis PLUT • Tampilan Website

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 1 kali bimtek (bimtek/training/TOT)	• Kegiatan Bimtek bagi UMKM melalui LMS (Learning Manajemen System) • sosialisasi via website
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• Perubahan RKPD • RKPD Perubahan 2025 • RKPD 2024 • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	• Surat Undangan Kepada UPT PPDD DInas Sosial sebagai Pembina UMKM Disabilitas (yang dimasukkan menjadi mitra melalui website) • Koordinasi Tempat Acara Festival dan Lauching Website • Permohonan Nama Domain Website dan Hosting Website
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• Pedoman terdapat di website yang bisa di akses oleh masyarakat • Pedoman Teknis Website • Pedoman Teknis Penggunaan Website
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• Tim Penyelenggara Inovasi
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Metode Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• layanan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• Undangan Launching Website PLUT • Stakeholder (Kemenkum RI Wilayah Riau) • Permohonan Penggunaan Gedung Riau Creative Hub (Dinas Pariwisata Provinsi Riau)

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
			• Jejaring Kolaborasi
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP PLUT • SOP Layanan Penggunaan Website
15.	Layanan Terintegrasi	0	• Fitur • Website • Website • Website • Website • Screenshoot Website
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• Proposal Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• Hasil Survey Kepuasan Masyarakat • Survey Kepuasan Masyarakat
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)	• Media Luar • Kegiatan Launching Website
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Video Inovasi Daerah Sistem Informasi Pembinaan KUMKM berbasis Website
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	• Jumlah Layanan sebanyak 2681 (keterbatasan export data tidak dapat keseluruhan)
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
	penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)		
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia